



L K R J

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya dan ucapan terima kasih kepada setiap pihak atas kerjasama dan bantuannya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022. Sebagai bentuk pertanggungjawaban akan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan Tugas Pembantuan (TP). Meliputi capaian capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian, kebijakan strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tindak lanjut akan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun anggaran sebelumnya.

Penyusunan LKPJ ini guna mengamatkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 69 ayat (1), memperdomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Penyusunan LKPJ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai misi dan tujuan serta sasaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan. Seperti apa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.

Diharapkan LKPJ ini dapat memberikan gambaran komprehensif akan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selaras dengan kebijakan strategis serta memenuhi semua target yang direncanakan. Bagaimana realisasi penyerapan anggaran

program dan kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bisa mewujudkan semua sasaran strategis berserta Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA periode 2018-2023. Sehingga dapat mendukung VISI dan MISI daerah Provinsi Kalimantan Barat. Terutama dalam urusan pemerintahan yaitu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Informasi capaian kinerja dinas ini bisa sangat bermanfaat dalam penentuan arah kebijakan kedepan guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Walaupun demikian, saran, kritik dan masukan akan sangat berharga bagi perbaikan manajemen demi peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Barat,



ISKANDAR ZULKARNAEN, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700510 199203 1 016

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Data Umum Perangkat Daerah	3
BAB II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUBAHAN (APBD-P) PERANGKAT DAERAH	17
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	19
3.1 Pelaksanaan Urusan	19
3.2 Kebijakan Strategis Yang Dilaksanakan	23
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	26
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	28
4.1 Urusan Pemerintah Yang Di Tugas Pembantuankan	28
4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintah Yang Diterima Pemerintah Pusat	28
4.2 Hambatan / Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Upaya Penyelesaian	32
4.2.1 SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32
4.2.2 SKPD-TP Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa	33
BAB V PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pembagian Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam UU No. 23 Tahun 2014	1
Tabel 1.2	Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	2
Tabel 1.3	Data Kepegawaian DPUPR 2022	3
Tabel 1.4	Rekapitulasi Anggaran Dinas PUPR 2022	11
Tabel 1.5	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan Bidang Bina Marga	11
Tabel 1.6	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan Bidang Sumber Daya Air	12
Tabel 1.7	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan Bidang Cipta Karya	13
Tabel 1.8	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan Bidang penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi	14
Tabel 1.9	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan Sekretariat	14
Tabel 3.1	Realisasi Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum	19
Tabel 3.2	Kebijakan Strategis yang Dilaksanakan	23
Tabel 3.3	Tabel Rekomendasi dari DPRD	26
Tabel 4.1	Data kepegawaian Satker 139251 Tahun Anggaran 2022	29
Tabel 4.2	Data kepegawaian Satker 139034 Tahun Anggaran 2022	30
Tabel 4.3	Program, Kegiatan dan Realisasi Tugas Pembantuan tahun 2022	31
Tabel 4.4	Perbandingan Realisasi tahun 2021 dengan tahun 2022	32
Tabel 4.5	Permasalahan dan solusi satker 139034 Tahun Anggaran 2022	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Pelaksanaan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berlandaskan dari Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan bagian dari pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib. Termuat dalam pasal 12 penjelasan dari pasal 11 mengenai Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah. Ditetapkan lebih rinci dalam lampiran UU No. 23 tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah.

Tabel 1.1
Pembagian Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam UU No. 23 Tahun 2014

NO.	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
1.	Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai Lintas Daerah kabupaten/kota.
		Pengembangan dan pengelolaan system irigasiprimer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota.
2.	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota.
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem airlimbah domestik regional.
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah kabupaten/kota.
6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah provinsi.
7.	Bangunan Gedung	Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi.
		Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi.
	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas Daerah kabupaten/kota.
	Jalan	Penyelenggaraan jalan provinsi.
	Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi.

		Penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi.
	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah provinsi.

Berpedoman dari UU No. 23 Tahun 2014 inilah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Lebih rinci pelaksanaan kegiatan mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 114 Tahun 2021. Menjabarkan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.

*Tabel 1.2
Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Barat*

Tugas :	Membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi :	1. Perumusan program kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
	2. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi.
	3. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi.
	4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
	5. Pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi.
	6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi.
	7. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas.
	8. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas.
	9. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh gubernur di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah membantu gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Sedangkan gubernur memiliki kewajiban untuk

menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang termuat dalam Pasal 69 ayat 1. Disampaikan kepada presiden melalui menteri. Maka, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada gubernur.

Lebih lanjut lagi penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2022 ini dilakukan dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan memperhatikan target yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

1.2 Data Umum Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja dalam mewujudkan realisasi anggaran tidak terlepas dari kuantitas dan kualitas Sumber Daya manusia (SDM) yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, data pegawai terinci dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.3
Data Kepegawaian DPUPR 2022

NO	NAMA LENGKAP / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN TERAKHIR
1	2	3	4
1	IRWAN LAHNISAFITRA, ST.,MT 19740604 199903 1 008	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) 01/04/2017	SEKRETARIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Ir. HENDARSYAH, MT 19670105 199503 1 003	PEMBINA TK I (IV/b) 01/04/2015	ANALIS JALAN JEMBATAN, SEKSI PEMBINAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	Ir. TEDDY ERWANTO, M.Sc 19630702 199502 1 001	PEMBINA TK I (IV/b) 01/04/2017	PEMBINA JASA KONSTRUKSI MADYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	HARDIAN, ST MT 19690114 199803 1 004	PEMBINA TK I (IV/b) 01/10/2019	KEPALA BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	TASLIMAJAN, ST, MBA 19721130 199703 2 008	PEMBINA TK I (IV/b) 01/10/2019	PEMBINA JASA KONSTRUKSI MADYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	ISKANDAR ZULKARNAEN, S.T, M.T. 19700510 199203 1 016	PEMBINA TK I (IV/b) 01/04/2020	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	MUSTITOMO, ST 19670601 199703 1 007	PEMBINA TK I (IV/b) 01/10/2020	KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG DAN BINA JASA KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	SUKRI, ST, MT 19690301 199203 1 009	PEMBINA TK I (IV/b) 01/10/2021	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN SUB BAGIAN RENCANA KERJA, MONITORING DAN EVALUASI, SEKRETARIAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



9	TRI PANGESTUTI T, ST, M.T. 19650125 199502 2 001	PEMBINA TK I (IV/b) 01/04/2022	PEMBINA JASA KONSTRUKSI MADYA SEKSI BINA JASA KONSTRUKSI, BIDANG PENATAAN RUANG DAN BINA JASA KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10	TARSISIUS, S.Sos, MH 19660420 198603 1 003	PEMBINA (IV/a) 01/10/2013	PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN, SEKSI PENGEMBANGAN, PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11	SUMARNO, ST,MT 19630110 199101 1 002	PEMBINA (IV/a) 01/04/2018	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN MADYA SEKSI PEMBINAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN, BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12	SHANTY LINDAWATI, ST MM 19720130 200212 2 002	PEMBINA (IV/a) 01/10/2019	KEPALA SEKSI BINA JASA KONSTRUKSI, BIDANG PENATAAN RUANG DAN BINA JASA KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	PUJI MULYANI, S.T, M.T 19750604 200401 2 002	PEMBINA (IV/a) 01/10/2020	PENGELOLA PENYUSUNAN BAHAN PEMBINAAN TEKNIS PENGUKURAN DAN PEMETAAN, SEKSI PEMBINAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14	BUDI MULIATI, ST 19671011 199603 2 003	PENATA TK I (III/d) 01/04/2008	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA, BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
15	ENI SURYANI, ST 19641213 198603 2 010	PENATA TK I (III/d) 01/04/2010	PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN SEKSI PENATAAN RUANG, BIDANG PENATAAN RUANG DAN BINA JASA KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
16	EMILIA, ST 19720520 199803 2 007	PENATA TK I (III/d) 01/04/2010	TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA, BIDANG SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
17	PANSIMAK ADI ROHAYAT, ST 19650922 199903 1 002	PENATA TK I (III/d) 01/04/2011	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MUDA, BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
18	SUBANDI, ST 19650312 199003 1 018	PENATA TK I (III/d) 01/04/2012	PEMBINA JASA KONSTRUKSI MUDA SEKSI BINA JASA KONSTRUKSI, BIDANG PENATAAN RUANG DAN BINA JASA KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
19	U.SUPIANDI, SE 19660812 198603 1 006	PENATA TK I (III/d) 01/04/2014	PENGELOLA KEUANGAN, SEKSI PEMBINAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20	SAPARI, ST 19650507 198810 1 002	PENATA TK I (III/d) 01/04/2014	PENGAWAS PENGAIRAN SEKSI PENGELOLAAN DAN PEMANFAAATAN WILAYAH SUNGAI, BIDANG SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
21	IWAN WAHYUDI, S.T 19750618 200212 1 006	PENATA TK I (III/d) 01/10/2014	KEPALA SEKSI PENATAAN RUANG, BIDANG PENATAAN RUANG DAN BINA JASA KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
22	SOLO GEMBIRA SIREGAR, ST 19641210 199311 1 001	PENATA TK I (III/d) 01/04/2016	ANALIS JALAN JEMBATAN, SEKSI PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PERALATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
23	TOTO SUHARTO, ST 19650519 199003 1 011	PENATA TK I (III/d) 01/04/2016	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN MUDA SEKSI PEMBINAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN, BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
24	ANDRIANI, SH 19720130 200312 2 001	PENATA TK I (III/d) 01/04/2016	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA, SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
25	HANITA HARDIYANI, SE 19730204 200502 2 002	PENATA TK I (III/d) 01/04/2017	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR, SEKRETARIAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
26	RINI HARYANI, ST 19751020 200701 2 022	PENATA TK I (III/d) 01/04/2017	ANALIS SUMBER DAYA AIR SEKSI PENGELOLAAN DAN PEMANFAAATAN WILAYAH SUNGAI, BIDANG SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
27	ARIE MARWANDI, S.ST 19770224 200003 1 003	PENATA TK I (III/d) 01/10/2017	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DAN PEMANFAAATAN WILAYAH SUNGAI, BIDANG SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
28	MANUEL MITJANG, ST 19730516 200604 1 005	PENATA TK I (III/d) 01/04/2018	PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN, SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN, BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
29	SUPIANDI, ST. M.T 19670712 199203 1 020	PENATA TK I (III/d) 01/04/2019	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN SUB BAGIAN RENCANA KERJA, MONITORING DAN EVALUASI,



			SEKRETARIAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
30	EVI SUGITA, S.T 19790604 200902 2 003	PENATA TK I (III/d) 01/10/2020	KEPALA SEKSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN, BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
31	JUANDA, S.ST., M.T 19700121 199303 1 006	PENATA TK I (III/d) 01/04/2021	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
32	FRANSISCA, S.Si, M.M. 19840414 201001 2 026	PENATA TK I (III/d) 01/04/2021	PENGAWAS TATA RUANG, SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
33	VERMA YUNITA CAROLINA SITANGGANG, S.T. 19780203 200903 2 004	PENATA TK I (III/d) 01/04/2021	ANALIS SUMBER DAYA AIR SEKSI SUNGAI DAN PANTAI, BIDANG SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
34	MARSELINUS KRISTOPORUS BEBY, ST 19791115 201101 1 003	PENATA TK I (III/d) 01/10/2021	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
35	JULI ERWANSYAH, ST., M.P 19750718 200212 1 006	PENATA TK I (III/d) 01/10/2021	KEPALA SEKSI IRIGASI DAN RAWA, BIDANG SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
36	DICKY KURNIAWAN, S.T 19860318 200903 1 001	PENATA TK I (III/d) 01/10/2021	PENATA RUANG AHLI MUDA, BIDANG PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
37	WIWIN HARYANTO, S.ST 19690802 200701 1 022	PENATA TK I (III/d) 01/04/2022	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN, BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
38	HENDRI ASAGOKMA PANGGABEAN, ST 19830907 201001 1 012	PENATA TK I (III/d) 01/04/2022	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN REKONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN, BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
39	FITRIA UTAMI, ST 19830710 201001 2 006	PENATA TK I (III/d) 01/04/2022	ANALIS SUMBER DAYA AIR, SEKSI PENGEMBANGAN JARINGAN SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
40	RILMA NISMALIA, S.T 19830416 201101 2 008	PENATA TK I (III/d) 01/04/2022	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA, SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
41	NURAZIZAH, A.Md 19720531 200003 2 004	PENATA (III/c) 01/04/2017	ANALIS KEPEGAWAIAN PENYELIA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
42	ISFANDIAR, ST,M.T 19800612 201101 1 003	PENATA (III/c) 01/04/2019	KEPALA SEKSI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN, BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
43	HENDRA MAROJAHAN PANGGABEAN, ST 19790710 201101 1 004	PENATA (III/c) 01/04/2019	PENGAWAS TATA RUANG, SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
44	NOBERTUS SUTINO, ST 19770602 201101 1 003	PENATA (III/c) 01/04/2019	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN, SEKSI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN, BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
45	ASTI OKDALIZA, S.T 19851003 201101 2 005	PENATA (III/c) 01/04/2019	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN, SEKSI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN, BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
46	SURYADI, ST 19690219 200701 1 008	PENATA (III/c) 01/04/2020	ANALIS JALAN JEMBATAN, SEKSI PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PERALATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
47	EKO SAPTONO, A.Md 19660827 199703 1 004	PENATA (III/c) 01/04/2020	PENGAWAS PENGAIRAN SEKSI IRIGASI DAN RAWA, BIDANG SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
48	RAHMI DAMAYANTI, S.T 19820724 201402 2 001	PENATA (III/c) 01/04/2022	PENELAAH MUTU KONSTRUKSI SEKSI BINA JASA KONSTRUKSI, BIDANG PENATAAN RUANG DAN BINA JASA KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
49	SUMIYATI 19671109 198908 2 002	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/10/2008	PENGELOLA KEUANGAN SEKSI PENGEMBANGAN JARINGAN SUMBER DAYA AIR, BIDANG SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
50	ENDANG SUGIANTO	PENATA MUDA TK I (III/b)	



	19651127 198811 1 002	01/04/2009	PENGELOLA KEUANGAN, SEKSI PENGEMBANGAN JARINGAN SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
51	SY. SUIFNI 19660910 199101 1 002	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2011	PENGELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN, SEKSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN, BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
52	MELYANI 19711016 199203 2 013	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2011	PENGELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN, SEKSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN, BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
53	URAI FARKAN SUBAKTI 19690821 199212 1 001	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2012	ANALIS JALAN JEMBATAN, SEKSI PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PERALATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
54	SUHADI 19650803 199303 1 010	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2012	PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN, SEKSI PENGEMBANGAN, PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
55	ATIN DALMIANUS 19690705 199502 1 002	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2015	PENGOLAH DATA, SEKSI PENDATAAN DAN PERENCANAAN CIPTA KARYA, BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
56	SYF.HELMA SRI 19690818 199603 2 003	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2016	PENGELOLA KEUANGAN, SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
57	NGADINO 19680414 199703 1 006	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2017	PENGAWAS PENGAIRAN SEKSI SUNGAI DAN PANTAI, BIDANG SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
58	PUSKA ROBLY 19670713 199403 1 005	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/10/2017	PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN, SEKSI PENGEMBANGAN, PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
59	YANTI DWI WULANDARI 19720708 199803 2 005	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2018	PENGELOLA KEUANGAN, SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
60	SUZUKI, ST 19700208 200701 1 012	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2019	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN PERTAMA PADA SEKSI PEMBINAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN, BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
61	MUHAMMAD AGUS IRWAN, S.S.T 19700830 200701 1 012	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2019	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN PERTAMA SEKSI PEMBINAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN, BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
62	SACHRIL HAVANI, S. Sos 19701205 200212 1 001	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2019	PENGADMINISTRASI UMUM, SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
63	MOHAMMAD YUNUS, S.S.T 19690911 200212 1 003	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2019	ANALIS JALAN JEMBATAN, SEKSI PENGEMBANGAN, PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
64	M.YANI, S.S.T 19670930 200701 1 019	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2019	PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN, SEKSI PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PERALATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
65	MALIK IBRANA, S.S.T 19690207 200701 1 033	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2019	ANALIS JALAN JEMBATAN, SEKSI PENGEMBANGAN, PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
66	ASEP SOPANDI, S.S.T 19700306 200701 1 022	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2019	ANALIS JALAN JEMBATAN, SEKSI PENGEMBANGAN, PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
67	ADI SUDARTONO, S.S.T 19710202 200701 1 024	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2019	PENGELOLA PENYUSUNAN BAHAN PEMBINAAN TEKNIS PENGUKURAN DAN PEMETAAN, SEKSI PEMBINAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
68	SYARIF FAUZI, S.S.T 19730329 200701 1 009	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2019	PENGAWAS TATA RUANG, SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
69	ALI SUTAMI, S.S.T 19750905 200701 1 010	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2019	ANALIS JALAN JEMBATAN, SEKSI PENGEMBANGAN, PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
70	RINI AFRININGSIH, S.T 19900407 201502 2 001	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2019	ANALIS JALAN JEMBATAN, SEKSI PEMBINAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
71	DARMAWAN, S.S.T	PENATA MUDA TK I (III/b)	



	19760206 200701 1 008	01/04/2019	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN, SEKSI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN, BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
72	NEDHA DECISHA, S.T 19861106 201502 2 003	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2019	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN, SEKSI PENDATAAN DAN PERENCANAAN CIPTA KARYA, BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
73	JUNI YONATAN, S.T 19880602 201502 1 003	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2019	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN, SEKSI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN, BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
74	BUDI SANTOSO, ST 19720717 200212 1 004	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2019	ANALIS SUMBER DAYA AIR SEKSI PENGEMBANGAN JARINGAN SUMBER DAYA AIR, BIDANG SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
75	RIZA JULIANSYAH, SE 19870701 200903 1 001	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/10/2020	PENELAAH PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN, SEKSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN, BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
76	JAILANI, S.S.T 19710501 200701 1 019	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2021	ANALIS JALAN JEMBATAN, SEKSI PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PERALATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
77	ASMINAH, S.S.T 19730406 200701 2 024	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2021	PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN, SEKSI PENGEMBANGAN, PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
78	ROSMITAWATI, SE 19750612 200701 2 016	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2022	PENGELOLA KEUANGAN SEKSI PENGELOLAAN DAN PEMANFAAATAN WILAYAH SUNGAI, BIDANG SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
79	MAROJAHAN TUA PANDAPOTAN RAJAGUKGUK, S.T 19850405 201902 1 002	PENATA MUDA (III/a) 01/02/2019	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN PERTAMA BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
80	RATNA WULANDARI, ST 19870501 201902 2 008	PENATA MUDA (III/a) 01/02/2019	TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN PERTAMA SEKSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN, BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
81	ARIS PURNOMO, S.T 19920806 201902 1 001	PENATA MUDA (III/a) 01/02/2019	TEKNIK PENGAIRAN PERTAMA SEKSI IRIGASI DAN RAWA, BIDANG SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
82	CUT ROSA BELLA, S.T. 19941104 201902 2 003	PENATA MUDA (III/a) 01/02/2019	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN PERTAMA BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
83	V RIAN WALUVI, S.T. 19960510 201902 2 004	PENATA MUDA (III/a) 01/02/2019	TEKNIK PENGAIRAN PERTAMA BIDANG SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
84	ARNO ARDHI MANTO, A.Md 19810616 201101 1 004	PENATA MUDA (III/a) 01/04/2019	ANALIS JALAN JEMBATAN, SEKSI PENGEMBANGAN, PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
85	ALAN, S.Tr.T 19810714 201101 2 002	PENATA MUDA (III/a) 01/04/2019	BENDAHARA, SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
86	MODESTUS, S.T. 19870218 201101 1 002	PENATA MUDA (III/a) 01/04/2019	ANALIS JALAN JEMBATAN, SEKSI PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PERALATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
87	ENY SURYATI, A.Md 19760202 201001 2 005	PENATA MUDA (III/a) 01/10/2020	PENGELOLA KEUANGAN SEKSI IRIGASI DAN RAWA, BIDANG SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
88	BOY IRAWAN, S.T 19870528 202012 1 004	PENATA MUDA (III/a) 01/12/2020	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN PERTAMA, BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
89	GOUVANLEX RIUSTOPO, S.T 19960309 202012 1 007	PENATA MUDA (III/a) 01/12/2020	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN PERTAMA, BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
90	REFIADI, A.Md 19841120 201402 1 002	PENATA MUDA (III/a) 01/04/2022	ANALIS JALAN JEMBATAN, SEKSI PENGEMBANGAN, PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
91	YORDAN HOPAYA 19700607 200701 1 029	PENGATUR TK I (II/d) 01/04/2019	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA, SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
92	AGUS HARDI PUTRA 19650806 200701 1 022	PENGATUR TK I (II/d) 01/04/2019	PENGELOLA KEUANGAN, SEKSI PEMBINAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
93	TATI TADJUDDIN 19650810 200701 2 023	PENGATUR TK I (II/d) 01/04/2019	PENGELOLA KEUANGAN, SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

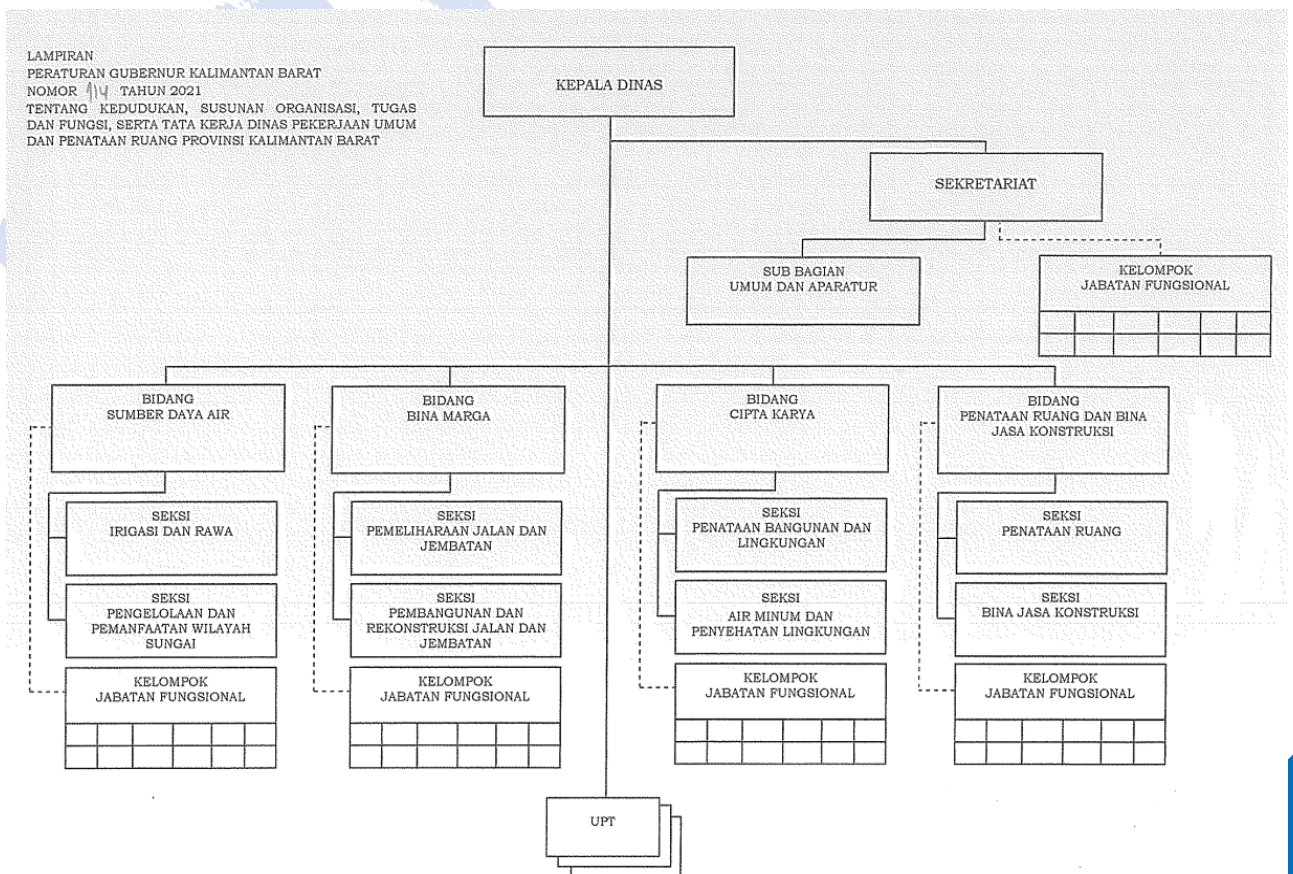


94	HERYANSYAH 19671116 200701 1 014	PENGATUR TK I (II/d) 01/04/2019	PENGELOLA KEUANGAN, SEKSI PEMBINAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
95	JEMMY TANIO 19680423 200701 1 014	PENGATUR TK I (II/d) 01/04/2019	PENGELOLA PENYUSUNAN BAHAN PEMBINAAN TEKNIS PENGUKURAN DAN PEMETAAN, SEKSI PEMBINAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
96	SUDARMAJI 19690313 200701 1 036	PENGATUR TK I (II/d) 01/04/2019	PENGELOLA KEUANGAN SEKSI BINA JASA KONSTRUKSI, BIDANG PENATAAN RUANG DAN BINA JASA KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
97	NURUL HUDA 19690518 200701 2 020	PENGATUR TK I (II/d) 01/04/2019	PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN, SEKSI PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PERALATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
98	JAMALUDDIN 19690805 200701 1 031	PENGATUR TK I (II/d) 01/04/2019	PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN, SEKSI PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PERALATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
99	RONI MARSAL 19700301 200701 1 027	PENGATUR TK I (II/d) 01/04/2019	PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN, SEKSI PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PERALATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
100	SHELLYA MARSHINTA 19710701 200701 2 017	PENGATUR TK I (II/d) 01/04/2019	PENGADMINISTRASI UMUM, SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
101	NENI MIRYANI 19730202 200701 2 020	PENGATUR TK I (II/d) 01/04/2019	PENGELOLA KEUANGAN, SEKSI PEMBINAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
102	M. IKHSAN 19730225 200701 1 009	PENGATUR TK I (II/d) 01/04/2019	PENGELOLA PENGAIRAN, SEKSI IRIGASI DAN RAWA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
103	ZAILANI 19730702 200701 1 020	PENGATUR TK I (II/d) 01/04/2019	VERIFIKATOR KEUANGAN, SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
104	DARWIN 19690904 200701 1 027	PENGATUR TK I (II/d) 01/04/2019	PENGOLAH DATA, SEKSI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN, BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
105	ERWANDA 19710225 200701 1 008	PENGATUR TK I (II/d) 01/04/2019	PENGOLAH DATA, SEKSI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN, BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
106	ADE YUSKHAIDIR 19710922 200701 1 015	PENGATUR TK I (II/d) 01/10/2019	PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN, SEKSI PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PERALATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
107	ARI JAFARI 19810511 200901 1 005	PENGATUR TK I (II/d) 01/04/2021	PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN, SEKSI PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PERALATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
108	PUTRI KUSUMA WARDANI, A.Md.Ak. 20010105 202204 2 001	PENGATUR (II/c) 00/00/2001	VERIFIKATOR KEUANGAN
109	FILDA DWI KARTIKA, A.Md. 19890106 201902 2 002	PENGATUR (II/c) 01/02/2019	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN PELAKSANA / TERAMPIL BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
110	ADITYA PRASETIO, A.Md 19941107 201902 1 002	PENGATUR (II/c) 01/02/2019	TEKNIK PENGAIRAN PELAKSANA / TERAMPIL BIDANG SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
111	PELISANGI 19650805 200212 1 001	PENGATUR (II/c) 01/04/2019	PETUGAS KEAMANAN, SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
112	MULYADI 19740625 200911 1 001	PENGATUR (II/c) 01/04/2019	PENGADMINISTRASI UMUM, SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
113	SITI ROHAYA YULIANDINI, A.Md 19940721 202012 2 025	PENGATUR (II/c) 01/12/2020	ARSIPARIS TERAMPIL, SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR, SEKRETARIAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
114	PURDI 19641222 199403 1 004	PENGATUR MUDA (II/a) 01/10/2010	PENGELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN, SEKSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN, BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Keseluruhan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah 202 pegawai yang terdiri dari 114 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 88 orang tenaga kontrak. Terbagi sejumlah 43 pegawai di Sekretariat yang terdiri dari 19 PNS dan 24 tenaga kontrak, 70 pegawai di Bidang Bina Marga yang terdiri dari 43 PNS dan 27 tenaga kontrak, 24 pegawai di bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi yang terdiri dari 16 PNS dan 8 tenaga kontrak, 37 pegawai di Bidang Sumber Daya Air yang terdiri dari 19 PNS dan 18 tenaga kontrak, dan 28 pegawai di bidang Cipta Karya yang terdiri dari 17 PNS dan 11 tenaga kontrak.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat mengalami banyak perubahan sejak tahun 2021. Terutama pada penetapan jabatan fungsional yang telah ditetapkan sejak tahun 2014 yaitu pada Undang - Undang No. 5 Tahun 2014. Namun realisasi untuk pengusulan jabatan fungsional baru mulai terlihat pada akhir tahun 2021, sehingga terjadi perubahan struktur organisasi pada awal tahun 2022 untuk seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat. Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022, disajikan dalam bagan berikut ini:



Guna melaksanakan tanggung jawab urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh 4 bidang, yaitu :

- a. Bidang Bina Marga yang membawahi:
 1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 2. Seksi Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan.
 3. Kelompok jabatan fungsionalMemiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan.
- b. Bidang Sumber Daya Air yang membawahi:
 1. Seksi Irigasi dan Rawa.
 2. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Sungai.
 3. Kelompok jabatan fungsionalMemiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air.
- c. Bidang Cipta Karya yang membawahi:
 1. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
 2. Seksi Air Minum dan Kesehatan Lingkungan.
 3. Kelompok jabatan fungsionalMemiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, dan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya.
- d. Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi yang membawahi:
 1. Seksi Penataan Ruang.
 2. Seksi Bina Jasa Konstruksi.
 3. Kelompok jabatan fungsionalMemiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Pengembangan Jasa Konstruksi dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 114 tahun 2021. Terbentuklah program dan kegiatan yang tertuang dalam perencanaan tahunan dinas yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Terdiri dari **10 program, 20 kegiatan** dan **76 sub-kegiatan** yang terinci sebagai berikut :

Tabel 1.4
Rekapitulasi Anggaran Dinas PUPR 2022

NO.	ASAL ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
			Rp	%
1.	APBD	737.453.372.409	709.779.288.912	96,25%
2.	APBN (TP)	31.797.220.000	29.340.083.928	86,35%
TOTAL		769.250.592.409	739.119.372.840	91,31%

Dalam melaksanakan urusan wajib bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum pada Tahun Anggaran 2022 telah dialokasikan dana untuk belanja dari Dana APBD Provinsi Kalimantan Barat sebesar **Rp737.453.372.409,00**, yang terdiri dari Belanja Operasi **Rp288.981.389.001,00** dan Belanja Modal **Rp448.471.983.408,00** dan dana Tugas Pembantuan sebesar **Rp31.797.220.000,00**.

a. Bidang Bina Marga

Tabel 1.5
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan Bidang Bina Marga
Tahun Anggaran 2022

No.	Program/Kegiatan/Sub-kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	414.835.027.949	402.850.686.149	97,11
a.	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	414.835.027.949	402.850.686.149	97,11
	1. Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	2.670.000.000	0,00	0,00
	2. Survey Kondisi Jalan/Jembatan	7.364.491.064	6.945.386.165	94,31
	3. Pembangunan Jalan	564.610.000	564.610.000	100
	4. Pelebaran Jalan Menambah Lajur	16.405.201.300	16.381.171.410	99,85
	5. Rekonstruksi Jalan	288.869.571.190	285.357.530.244	98,78
	6. Pemeliharaan Rutin Jalan	71.449.499.452	71.120.549.392	99,54
	7. Pembangunan Jembatan	7.530.396.965	7.529.309.747	99,99
	8. Penggantian Jembatan	15.206.864.953	11.170.275.015	73,46
	9. Pemeliharaan Rutin Jembatan	3.590.840.925	3.416.286.595	95,14
	10. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan / Jembatan	1.183.552.100	365.567.581	30,89

b. Bidang Sumber Daya Air

Tabel 1.6
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan Bidang Sumber Daya Air
Tahun Anggaran 2022

No.	Program/Kegiatan/Sub-kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	161.774.453.900	159.177.437.436	98,39
	a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	108.918.826.800	107.525.226.748	98,72
	1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	339.077.400	316.064.054	93,21
	2. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	286.432.800	269.580.340	94,12
	3. Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	2.434.583.700	2.249.281.525	92,39
	4. Pembangunan Unit Air Baku	527.892.700	507.536.520	96,14
	5. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	29.056.163.500	28.555.340.526	98,28
	6. Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	5.139.689.200	5.072.437.508	98,69
	7. Normalisasi/Restorasi Sungai	70.915.830.900	70.464.588.200	99,36
	8. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	205.090.700	81.236.175	39,61
	9. Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	14.065.900	9.161.900	65,14
	b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	52.855.627.100	51.652.210.688	97,72
	1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	113.696.800	110.094.800	96,83
	2. Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	3.439.877.100	3.267.777.304	95,00
	3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	49.302.053.200	48.274.338.584	97,92

c. Bidang Cipta Karya

Tabel 1.7
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan Bidang Cipta Karya
Tahun Anggaran 2022

No.	Program/Kegiatan/Sub-kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	82.150.000	75.540.424	91,95
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	82.150.000	75.540.424	91,95
	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	82.150.000	75.540.424	91,95
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	82.150.000	79.798.246	97,14
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	82.150.000	79.798.246	97,14
	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	82.150.000	79.798.246	97,14
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	253.390.000	251.290.000	99,17
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	253.390.000	251.290.000	99,17
	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	26.130.000	25.560.000	97,82
	2. Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	26.130.000	25.280.000	96,75
	3. Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	201.130.000	200.450.000	99,66
4.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	103.246.548.265	98.465.421.339	95,37
	a. Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	103.246.548.265	98.465.421.339	95,37
	1. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	63.916.661.265	61.895.537.025	96,84
	2. Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	39.329.887.000	36.569.884.314	92,98
5.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	33.088.332.500	25.753.395.400	77,83
	a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	33.088.332.500	25.753.395.400	77,83
	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	393.693.800	332.169.835	84,37
	2. Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1.270.000	0	0
	3. Penataan Bangunan dan Lingkungan	32.693.368.700	25.421.225.565	77,76

d. Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi

Tabel 1.8
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan Bidang penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi
Tahun Anggaran 2022

No.	Program/Kegiatan/Sub-kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASAKONSTRUKSI	351.155.900	331.592.652	94,43
a.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	216.541.800	215.536.582	99,54
	1. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	216.541.800	215.536.582	99,54
b.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	57.467.400	53.815.075	93,64
	1. Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	25.043.000	22.075.575	88,15
	2. Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	32.424.400	31.739.500	97,89
c.	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	77.146.700	62.240.995	80,68
	1. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	77.146.700	62.240.995	80,68
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	775.202.400	761.601.808	98,25
a.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	575.203.200	570.274.946	99,14
	1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	575.203.200	570.274.946	99,14
b.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	199.999.200	191.326.862	95,66
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	199.999.200	191.326.862	95,66

e. Sekretariat

Tabel 1.9
Realisasi Program, Kegiatan Sekretariat Tahun Anggaran 2022

No.	Program/Kegiatan/Sub-kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.964.961.495	22.032.525.458	95,94
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.539.400	144.408.606	96,57
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.050.300	85.928.700	97,59
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.606.800	6.473.306	97,98
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.080.900	5.955.700	97,94

	4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.599.700	6.599.700	100
	5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.489.700	5.437.200	99,04
	6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.538.600	24.907.900	90,45
	7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.173.400	9.106.100	99,27
	b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.973.908.715	15.196.813.307	95,14
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.425.044.115	14.712.693.052	95,38
	2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	492.669.900	428.531.974	86,98
	3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.680.700	6.657.430	99,65
	4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.437.500	4.431.792	99,87
	5.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.686.400	11.491.809	98,33
	6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	27.215.900	27.012.345	99,25
	7.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.174.200	5.994.905	97,10
	c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	318.011.000	307.178.844	96,59
	1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.589.100	3.546.950	98,83
	2.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	263.561.300	253.150.324	96,05
	3.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.792.400	23.696.215	99,60
	4.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.068.200	26.785.355	98,96
	d.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72.976.700	61.445.687	84,20
	1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.708.400	6.308.878	94,04
	2.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.568.300	1.192.200	76,02
	3.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64.700.000	53.944.609	83,38
	e.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.366.970.650	1.319.704.088	96,54
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.635.650	16.791.610	90,10
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	851.638.600	829.893.780	97,45
	3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	184.129.200	175.997.428	95,58
	4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.400.000	16.660.000	71,20
	5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.341.000	19.682.960	92,23
	6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.920.000	7.920.000	100
	7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.200.000	6.300.000	87,50
	8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.525.000	150.006.445	97,71
	9.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	26.752.400	24.360.385	91,06

	10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	72.428.800	72.091.480	99,53
	f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.076.302.570	4.035.008.585	98,99
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	984.800.000	955.828.915	97,06
	2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.091.502.570	3.079.179.670	99,60
	g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.007.252.460	967.966.341	96,10
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	248.964.600	213.498.795	85,75
	2.	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	4.996.000	99,92
	3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158.440.500	158.157.480	99,82
	4.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	50.000.000	48.751.200	97,50
	5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	544.847.360	542.562.866	99,58



Tahun Anggaran 2022

Urutan	Kode				Unit	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Program						Setelah Program						Bertambah/Berkurang		
	1	2	3	4				T-1	T	T+1	T-1	T	T+1	T-1	T	T+1	T-1					
																		Betangs Operasi	Betangs Modal		Betangs Tidak Terutang	Betangs Transfer
1	03	02	1.01	46	Normalisasi Restoran Sengat	DAK-Fiskal Bkng Iknpi-Penggunaan Dana Transfer Uraan/Don Alokasi Uraan			49,574,194,100,00	0,00	0,00	49,574,194,100,00	0,00	0,00	49,574,194,100,00	0,00	0,00	49,574,194,100,00	0,00			
1	03	02	1.01	61	Perbaikan dan Peningkatan Kelembagaan Pengabdian SEA, Kelestarian Prorasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		202,174,700,00	0,00	0,00	202,174,700,00	0,00	0,00	202,174,700,00	0,00	0,00	202,174,700,00	0,00	202,174,700,00	0,00		
1	03	02	1.01	62	Evakuasi dan Rekonstruksi Identi (Rekonstruksi) Pemukiman SEA WS, Kelestarian Prorasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14,065,900,00	0,00	0,00	14,065,900,00	0,00	0,00	14,065,900,00	0,00	0,00	14,065,900,00	0,00	14,065,900,00	0,00		
1	03	02	1.02	1.02	Pengembangan dan Pengembangan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Uraan, Daerah Kabupaten Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16,277,451,100,00	811,152,000,00	0,00	0,00	17,088,631,100,00	16,102,451,100,00	986,452,000,00	0,00	0,00	17,088,631,100,00	16,102,451,100,00	986,452,000,00	0,00	17,088,631,100,00	0,00
1	03	02	1.02	01	Perencanaan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Rencana Sistem, Kelestarian Prorasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		231,672,000,00	0,00	0,00	231,672,000,00	131,672,000,00	0,00	0,00	131,672,000,00	0,00	0,00	131,672,000,00	0,00	131,672,000,00	0,00	
1	03	02	1.02	10	Pengembangan, Rekonstruksi, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rawa	Dana Transfer Uraan/Dana Alokasi Uraan	Kota Pontianak, Kota Kubu Raya, Kota Sekeloa, Kota Katingan	93,723,000,00	811,152,000,00	0,00	0,00	904,875,100,00	18,752,300,00	986,452,000,00	0,00	0,00	100,407,700,00	100,000,000,00	0,00	100,407,700,00	0,00	
1	03	02	1.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Dana Transfer Uraan/Dana Alokasi Uraan	Kota Pontianak, Kota Kubu Raya, Kota Sekeloa, Kota Katingan	15,952,053,200,00	0,00	0,00	15,952,053,200,00	15,952,053,200,00	0,00	0,00	15,952,053,200,00	0,00	0,00	15,952,053,200,00	0,00	15,952,053,200,00	0,00	
1	03	03	1.01	1.01	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN AIR MINUM	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		82,150,000,00	0,00	0,00	82,150,000,00	82,150,000,00	0,00	0,00	82,150,000,00	0,00	0,00	82,150,000,00	0,00	82,150,000,00	0,00	
1	03	03	1.01	01	Perencanaan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Rencana Sistem, Kelestarian Prorasi	Dana Transfer Uraan/Dana Bagi Hasil		82,150,000,00	0,00	0,00	82,150,000,00	82,150,000,00	0,00	0,00	82,150,000,00	0,00	0,00	82,150,000,00	0,00	82,150,000,00	0,00	
1	03	05	1.01	1.01	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		82,150,000,00	0,00	0,00	82,150,000,00	82,150,000,00	0,00	0,00	82,150,000,00	0,00	0,00	82,150,000,00	0,00	82,150,000,00	0,00	
1	03	05	1.01	01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Dana Transfer Uraan/Dana Bagi Hasil		82,150,000,00	0,00	0,00	82,150,000,00	82,150,000,00	0,00	0,00	82,150,000,00	0,00	0,00	82,150,000,00	0,00	82,150,000,00	0,00	
1	03	05	1.01	01	Perencanaan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Rencana Sistem, Kelestarian Prorasi	Dana Transfer Uraan/Dana Bagi Hasil	Semua Kabupaten Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,150,000,00	0,00	0,00	82,150,000,00	82,150,000,00	0,00	0,00	82,150,000,00	0,00	0,00	82,150,000,00	0,00	82,150,000,00	0,00	
1	03	05	1.01	01	Perencanaan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Rencana Sistem, Kelestarian Prorasi	Dana Transfer Uraan/Dana Bagi Hasil		1,382,872,100,00	54,395,700,000,00	0,00	0,00	55,778,872,100,00	5,821,409,100,00	66,897,163,000,00	0,00	0,00	72,718,572,100,00	16,940,000,000,00	0,00	72,718,572,100,00	16,940,000,000,00	0,00
1	03	05	1.01	01	Perencanaan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Rencana Sistem, Kelestarian Prorasi	Dana Transfer Uraan/Dana Bagi Hasil	Kota Pontianak, Kota Kubu Raya, Kota Sekeloa, Kota Katingan	682,792,100,00	31,835,700,000,00	0,00	0,00	32,528,492,100,00	32,792,100,00	32,485,700,000,00	0,00	0,00	32,818,492,100,00	16,940,000,000,00	0,00	32,818,492,100,00	16,940,000,000,00	0,00
1	03	05	1.01	02	Rehabilitasi, Renovasi dan Upgrade Jaringan Pengaliran air untuk Kelestarian Daerah Perkotaan	Dana Transfer Uraan/Dana Alokasi Uraan	Kota Pontianak, Kota Kubu Raya, Kota Sekeloa, Kota Katingan	700,080,000,00	22,560,000,000,00	0,00	0,00	23,260,080,000,00	5,788,617,000,00	34,411,463,000,00	0,00	0,00	40,200,000,000,00	16,940,000,000,00	0,00	40,200,000,000,00	16,940,000,000,00	0,00
1	03	09	1.01	1.01	PROGRAM PASTORISASI BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19,854,807,200,00	10,000,000,000,00	0,00	0,00	29,854,807,200,00	19,654,807,200,00	10,200,000,000,00	0,00	0,00	29,854,807,200,00	0,00	0,00	29,854,807,200,00	0,00	
1	03	09	1.01	01	Perencanaan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Rencana Sistem, Kelestarian Prorasi	Dana Transfer Uraan/Dana Bagi Hasil		19,854,807,200,00	10,000,000,000,00	0,00	0,00	29,854,807,200,00	19,654,807,200,00	10,200,000,000,00	0,00	0,00	29,854,807,200,00	0,00	0,00	29,854,807,200,00	0,00	
1	03	09	1.01	01	Perencanaan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Rencana Sistem, Kelestarian Prorasi	Dana Transfer Uraan/Dana Bagi Hasil	Kota Pontianak, Kota Kubu Raya, Kota Sekeloa, Kota Katingan	215,837,000,00	0,00	0,00	215,837,000,00	215,837,000,00	0,00	0,00	215,837,000,00	0,00	0,00	215,837,000,00	0,00	215,837,000,00	0,00	
1	03	09	1.01	02	Supaya Pastorisasi Bangunan dan Lingkungan	Dana Transfer Uraan/Dana Alokasi Uraan	Kota Pontianak, Kota Kubu Raya, Kota Sekeloa, Kota Katingan	581,270,000,00	0,00	0,00	581,270,000,00	1,270,000,000,00	0,00	0,00	1,270,000,000,00	0,00	0,00	1,270,000,000,00	0,00	1,270,000,000,00	0,00	
1	03	09	1.01	03	Pernyataan Bangunan dan Lingkungan	Dana Transfer Uraan/Dana Alokasi Uraan	Kota Pontianak, Kota Kubu Raya, Kota Sekeloa, Kota Katingan	19,507,680,000,00	10,000,000,000,00	0,00	0,00	29,507,680,000,00	19,437,680,000,00	10,200,000,000,00	0,00	0,00	29,637,680,000,00	580,000,000,000,00	0,00	29,637,680,000,00	580,000,000,000,00	0,00
1	03	10	1.01	1.01	PROGRAM PENYELANGGARAN JALAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		95,016,020,041,00	286,514,003,093,00	0,00	0,00	381,530,024,034,00	95,016,020,041,00	303,974,043,093,00	0,00	0,00	388,990,063,034,00	17,460,040,000,000,00	0,00	388,990,063,034,00	17,460,040,000,000,00	0,00
1	03	10	1.01	01	Perencanaan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Rencana Sistem, Kelestarian Prorasi	Dana Transfer Uraan/Dana Bagi Hasil		95,016,020,041,00	286,514,003,093,00	0,00	0,00	381,530,024,034,00	95,016,020,041,00	303,974,043,093,00	0,00	0,00	388,990,063,034,00	17,460,040,000,000,00	0,00	388,990,063,034,00	17,460,040,000,000,00	0,00
1	03	10	1.01	02	Rehabilitasi Jalan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Dana Transfer Uraan/Dana Alokasi Uraan		500,000,000,00	2,170,000,000,00	0,00	0,00	2,670,000,000,00	500,000,000,00	2,170,000,000,00	0,00	0,00	2,670,000,000,00	0,00	0,00	2,670,000,000,00	0,00	
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/lembatan	Dana Transfer Uraan/Dana Alokasi Uraan		7,364,491,664,00	0,00	0,00	7,364,491,664,00	7,364,491,664,00	0,00	0,00	7,364,491,664,00	0,00	0,00	7,364,491,664,00	0,00	7,364,491,664,00	0,00	
1	03	10	1.01	05	Pertambangan Jalan	Dana Transfer Uraan/Dana Alokasi Uraan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed by Smaida

Halaman 3 dari 5

Urutan	Kode				Unit	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Program						Setelah Program						Bertambah/Berkurang		
	1	2	3	4				T-1	T	T+1	T-1	T	T+1	T-1	T	T+1	T-1					
																		Betangs Operasi	Betangs Modal		Betangs Tidak Terutang	Betangs Transfer
1	03	10	1.01	07	Rekonstruksi Jalan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Uraan/Dana Alokasi Uraan		928,052,100,00	10,000,000,000,00	0,00	0,00	1,692,052,100,00	928,052,100,00	16,000,000,000,00	0,00	0,00	16,920,052,100,00	17,460,040,000,000,00	0,00	16,920,052,100,00	17,460,040,000,000,00	0,00
1	03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan	Dana Transfer Uraan/Dana Alokasi Uraan		10,183,127,500,00	253,162,019,840,00	0,00	0,00	253,345,147,340,00	10,183,127,500,00	270,621,059,400,00	0,00	0,00	300,805,187,140,00	17,460,040,000,000,00	0,00	300,805,187,140,00	17,460,040,000,000,00	0,00
1	03	10	1.01	11	Perbaikan Rambu Jalan	Dana Transfer Uraan/Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Uraan/Dana Alokasi Uraan		71,662,465,552,00	0,00	0,00	71,662,465,552,00	71,662,465,552,00	0,00	0,00	71,662,465,552,00	0,00	0,00	71,662,465,552,00	0,00	71,662,465,552,00	0,00	
1	03	10	1.01	12	Pertambangan Jalan	Dana Transfer Uraan/Dana Alokasi Uraan		104,399,700,00	15,181,983,253,00	0,00	0,00	15,286,382,953,00	104,399,700,00	15,181,983,253,00	0,00	0,00	15,286,382,953,00	0,00	0,00	15,286,382,953,00	0,00	
1	03	10	1.01	19	Perbaikan Rambu Jalan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,192,840,925,00	0,00	0,00	3,192,840,925,00	3,192,840,925,00	0,00	0,00	3,192,840,925,00	0,00	0,00	3,192,840,925,00	0,00	3,192,840,925,00	0,00	
1	03	10	1.01	22	Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatn Hibah dan Perantara Hibah		1,080,644,100,00	0,00	0,00	1,080,644,100,00	1,080,644,100,00	0,00	0,00	1,080,644,100,00	0,00	0,00	1,080,644,100,00	0,00	1,080,644,100,00	0,00	
1	03	11	1.01	1.01	PROGRAM PENGEMBANGAN LAKSANA STRUKS	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		351,156,000,00	0,00	0,00	351,156,000,00	351,156,000,00	0,00	0,00	351,156,000,00	0,00	0,00	351,156,000,00	0,00	351,156,000,00	0,00	
1	03	11	1.01	04	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Jalan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		229,541,800,00	0,00	0,00	229,541,800,00	229,541,800,00	0,00	0,00	229,541,800,00	0,00	0,00	229,541,800,00	0,00	229,541,800,00	0,00	
1	03	11	1.02	1.02	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Jalan	Dana Transfer Uraan/Dana Alokasi Uraan		44,467,000,00	0,00	0,00	44,467,000,00	44,467,000,00	0,00	0,00	44,467,000,00	0,00	0,00	44,467,000,00	0,00	44,467,000,00	0,00	
1	03	11	1.02	01	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Jalan	Dana Transfer Uraan/Dana Alokasi Uraan		25,043,000,00	0,00	0,00	25,043,000,00	25,043,000,00	0,00	0,00	25,043,000,00	0,00	0,00	25,043,000,00	0,00	25,043,000,00	0,00	
1	03	11	1.02	03	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Jalan	Dana Transfer Uraan/Dana Alokasi Uraan		19,424,000,00	0,00	0,00	19,424,000,00	19,424,000,00	0,00	0,00	19,424,000,00	0,00	0,00	19,424,000,00				

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Pelaksanaan Urusan

Tabel 3.1
Realisasi Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum

No.	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	Mengoptimalkan Pengembangan Penyediaan Sarana Air Baku	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Irigasi kondisi baik 55,04%	56,90%			
					Pengendali banjir 52,70%	53,02%			
				a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang pengendali banjir 87,05 Km	87,31 Km			
				<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 	2 dokumen	2 dokumen			
				<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 	1 Dokumen	3 Dokumen			
				<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi 	1 Dokumen	3 Dokumen			
				<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Unit Air Baku 	3 Km	1,26 Km			
				<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 	87,05 Km	87,31 Km			
				<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 	1 unit	1 unit			
				<ul style="list-style-type: none"> Normalisasi / Restorasi Sungai 	87,05 Km	87,31 Km			
				<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 	2 Lembaga	2 Lembaga			



				<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi 	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Mengoptimalkan Kinerja Jaringan Irigasi dan Rawa Untuk Mendukung Ketahanan Pangan		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 	Panjang irigasi provinsi kondisi baik 2.579,34 Km	12.142,51 Km			
				<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 	2 dokumen	2 dokumen			
				<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa 	1.032,98 Km	1.222,11 Km			
				<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 	2.579,34 Km	10.920,40 Km			
2.				Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan mantap 72,18%	72,28%			
		Pemantapan Kapasitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan dan Mengoptimalkan pemeliharaan jalan dan jembatan		<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Jalan Provinsi 	Jalan provinsi kondisi mantap 1.107,78 Km	1.109,25 Km			tambahan Rp310.414 .638.971,00 dibanding tahun 2022 guna mencapai target jalan mantap 80% akhir tahun 2023.
				<ul style="list-style-type: none"> Pembebasan Lahan/ Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 	288.960 M ²	0 M ²			
				<ul style="list-style-type: none"> Survey Kondisi Jalan/Jembatan 	3 dokumen	3 dokumen			
				<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Jalan 	-	-			
				<ul style="list-style-type: none"> Pelebaran jalan menambah lajur 	2,7 Km	2,28 Km			
				<ul style="list-style-type: none"> Rekonstruksi Jalan 	140,43 Km	167,31 Km			
				<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Rutin Jalan 	81,39 Km	18,37 Km			
				<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Jembatan 	135 M	135 M			
				<ul style="list-style-type: none"> Penggantian Jembatan 	159 M	159 M			
				<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Rutin Jembatan 	120 M	470 M			
				<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 	1 Dokumen	1 Dokumen			
3.				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					



			Peningkatan Layanan Air Bersih ke Rumah Tangga	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					
				<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 	2 dokumen	2 dokumen			
4.				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah					
			Meningkatkan Layanan Sanitasi ke Rumah Tangga	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional					
				<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 	2 dokumen	2 dokumen			
6.				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase					
			Mengoptimalkan Normalisasi Sungai dan Saluran Drainase	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi					
				<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 	2 dokumen	2 dokumen			
				<ul style="list-style-type: none"> Supervisi pembangunan / peningkatan / rehabilitasi sistem drainase perkotaan 	1 dokumen	1 dokumen			
				<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan sistem drainase perkotaan 	1 unit	1 unit			
8.				Program Penataan Bangunan Gedung		luas gedung yang dibangun dan di tata 20.824,42 M ²	15.026,08 M ²		
			Pemenuhan kebutuhan gedung dan prasarana gedung pemerintahan	a. Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	3 unit	15 unit			
				<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 	1 dokumen	3 dokumen			
				<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai 	3 unit	15 unit			



				Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					
9.				Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	luasannya kawasan yang dibangun dan di tata 5.035,21 M²	6.311,63 M²			
				a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Kawasan	7 Kawasan			
				• Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota	2 dokumen	3 dokumen			
				• Supervisi Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	5 Kawasan	7 Kawasan			
				• Penataan Bangunan dan Lingkungan	5 Kawasan	7 Kawasan			
10.				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Tenaga ahli konstruksi yang bersertifikat 72,01%	78,56%			
			Mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas	a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	190 orang	80 orang			
				• Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	190 orang	80 orang			
				b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1 kegiatan	1 kegiatan			
				• Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 laporan	1 laporan			
				• Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	30 orang	20 orang			
				c. Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1 dokumen	1 dokumen			
				• Penyiapan/ pembuatan NSPK kebijakan khusus	1 dokumen	-			

				penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai peraturan perundang – undangan					
				<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi 	15 laporan	4 laporan			
11.				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan pemanfaatan ruang 70%	72%			
			Peningkatan Rencana Tata Ruang	a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Dokumen	18 Dokumen			
				<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RTRW Provinsi 	Dokumen	18 Dokumen			
			Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW Prov	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 dokumen	1 dokumen			
				<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 	1 dokumen	1 dokumen			

3.2 Kebijakan Strategis Yang Dilaksanakan

Untuk mencapai kebijakan strategis dalam koridor ruang lingkup pekerjaan percepatan pembangunan dan pembangunan berwawasan lingkungan. Tidak terlepas dari target sasaran kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) periode 5 tahun berjalan.

Tabel 3.2
Kebijakan Strategis yang Dilaksanakan

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Pemantapan Kapasitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan dan Mengoptimalkan pemeliharaan jalan dan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan 	Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar



		<ul style="list-style-type: none"> • Permen PU No. 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan 	
	Mengoptimalkan Pengembangan Penyediaan Sarana Air Baku	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 	Meningkatkan pengembangan penyediaan sarana air baku
	Mengoptimalkan Kinerja Jaringan Irigasi dan Rawa Untuk Mendukung Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air • PP No. 73 tahun 2013 tentang Rawa • PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi • Permen PUPR No. 29/PRT/M/2015 tentang Rawa • Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi 	Meningkatkan Kinerja Jaringan Irigasi dan Rawa Untuk Mendukung Ketahanan Pangan
	Meningkatkan Layanan Sanitasi ke Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> • Permen PUPR No. 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik • Pepres No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi • Permen PUPR No. 01/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 	Peningkatan layanan sanitasi ke rumah tangga
	Peningkatan Layanan Air Bersih ke Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> • PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum • Permen PUPR No. 01/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal 	Peningkatan layanan air bersih ke rumah tangga



		<p>Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 	
	Peningkatan Layanan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 	Meningkatkan layanan pengelolaan persampahan
	Mengoptimalkan Normalisasi Sungai dan Saluran Drainase	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air • PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai • Permen No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai 	Peningkatan kualitas Normalisasi Sungai dan Saluran Drainase
	Pemenuhan kebutuhan gedung dan prasarana gedung pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 	Meningkatkan Pemenuhan kebutuhan gedung dan prasarana gedung pemerintahan
	Mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas		Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas
	Peningkatan Rencana Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang • PP RI No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 	Peningkatan kesesuaian rencana, pemanfaatan dan kelola tata ruang sesuai dengan RTRW Provinsi Kalimantan Barat
	Peningkatan Kesesuaian Rencana Pembangunan Sektor Dengan RTRW Prov		
	Peningkatan Kesesuaian RTR Kab/Kota Dengan RTRW Prov		
	Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW Prov		

3.3 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD T.A. 2022

Berkenaan dengan surat dari Gubernur Kalimantan Barat nomor 120 / 2296 / RO-PEM perihal penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021. Berlandaskan dari Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Barat nomor 5/DPRD/2022 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021. Disampaikan beberapa hal terkait dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang memuat tentang pencapaian kondisi jalan mantap, pemeliharaan sungai pengendali banjir, serta program kegiatan padat karya.

Tabel 3.3
Tabel Rekomendasi dari DPRD

No.	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
1.	Agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hendaknya pada tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 dapat memberikan perhatian yang besar terhadap ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dengan mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk mewujudkan kondisi jalan mantap sebesar 80% sesuai dengan target akhir RPJMD pada tahun 2023.	Pagu anggaran tahun 2022 untuk Program Penyelenggaraan Jalan Rp414.835.027.949,00 dengan realisasi Rp402.850.686.149,00 atau 97,11% berhasil mencapai persentase panjang jalan provinsi kondisi mantap 72,28% (1.109,25 Km). Meningkat 5,33% dari tahun 2021 senilai 66,95%. Sedangkan pada tahun anggaran 2023 pagu anggaran untuk Program Penyelenggaraan Jalan direncanakan senilai Rp725.249.666.920,00 ada tambahan Rp310.414.638.971,00 dibanding tahun 2022 guna mencapai target jalan mantap 80% akhir tahun 2023.	Penambahan anggaran untuk Tahun Anggaran 2023 guna pencapaian target jalan provinsi kondisi mantap 80%.
2.	Program kegiatan padat karya dapat dilaksanakan pada awal tahun anggaran.	Mengingat anggaran kegiatan padat karya merupakan kucuran dari dana pusat maka proses pelaksanaan kegiatan tergantung kapan dana itu masuk ke pemerintah daerah.	Bisa dilaksanakan jika mendapat kucuran dana dan waktu pelaksanaan tergantung kapan dana masuk ke daerah.

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan merupakan bagian penting dalam mewujudkan jalan provinsi kondisi mantap. Berbekal anggaran senilai Rp414.835.027.949,00 berhasil mewujudkan 72,28% (1.109,25 Km) jalan provinsi kondisi mantap. Meningkat 5,33% dari tahun 2021 senilai 66,95% dengan pagu anggaran Rp393.516.099.383,00. Program Penyelenggaraan Jalan mengalami

peningkatan anggaran Rp21.318.928.566,00 pada Tahun Anggaran 2022 dibanding Tahun Anggaran 2021. Demi mewujudkan target jalan provinsi kondisi mantap 80% pagu anggaran Program Penyelenggaraan Jalan mengalami peningkatan Rp310.414.638.971,00 menjadi Rp725.249.666.920 pada Tahun Anggaran 2023 dibanding dengan Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan barat nomor 841/DPUPR/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Ruas - Ruas Jalan Menurut Status dan Fungsinya Sebagai Jalan Provinsi di Kalimantan Barat maka total panjang jalan provinsi adalah sepanjang 1.530,40 Km. Mewujudkan target jalan mantap 80% atau sepanjang 1.224,32 Km maka beban kerja Tahun Anggaran 2023 adalah 115,07 Km dari kondisi jalan mantap Tahun Anggaran 2022 sepanjang 1.109,25 Km.

Pencapaian Indikator Kinerja persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendali banjir 53,02% tidak terlepas dari pagu anggaran Program pengelolaan Sumber Daya Air Rp161.774.453.900,00 realisasi Rp159.177.437.436,00 atau 98,39%. Lebih spesifik pada kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp108.918.826.800,00 realisasi anggaran 98,72% atau Rp107.525.226.748,00. Tingkat capaian kinerja meningkat 0,25% dibanding tahun 2021 (52,77%), serta berhasil mewujudkan panjang pengendali banjir (sungai/saluran) dalam kondisi baik sepanjang 87,31 Km.

Pencapaian jalan provinsi kondisi mantap 72,28% yang merupakan Indikator Kinerja Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Mantap bernilai positif jika dilihat dari capaian terhadap target pada tahun 2022 senilai 72,18% yang termuat dalam PERJANKIN dan RENSTRA. Mengalami peningkatan 0,10% dari target capaian kinerja. Begitu juga capaian kinerja dari Indikator Kinerja Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendali banjir 53,02%, bernilai positif terhadap target 52,70%. Mengalami peningkatan 0,32% dari target capaian kinerja.

BAB IV

CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintah Yang di Tugas Pembantuan

4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Pusat

1) Tujuan SKPD-TP

Tujuan yang ingin dicapai oleh SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak terlepas dan mengacu pada yang menjadi tujuan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, yaitu:

- Mewujudkan konektivitas jalan nasional di Provinsi Kalimantan Barat yang andal dan prima dalam mendukung perwujudan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian berlandaskan gotong royong.
- Meningkatkan standar pelayanan jalan nasional di Provinsi Kalimantan Barat sesuai kebutuhan dan standar.
- Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional di Provinsi Kalimantan Barat.
- Meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat.

Sedangkan tujuan dari SKPD-TP Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah terciptanya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan bermanfaat, meliputi:

- Meningkatkan kemampuan sumber daya air untuk meningkatkan persediaan air guna memenuhi kebutuhan lahan rawa.

- Meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengoperasian dan pemeliharaan prasarana pengairan.
 - Mempertahankan kondisi jaringan rawa, meningkatkan pengaturan air di jaringan utama secara optimal, pemeliharaan jaringan rawa dalam rangka menunjang program ketahanan pangan.
- 2) Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)
- 139251 / OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SDA

SKPD TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat memiliki total jumlah pegawai sebanyak 21 orang. Didominasi dengan PNS berjumlah 16 orang dan 5 orang tenaga kontrak. PNS bergolongan IV berjumlah 1 orang, bergolongan III sejumlah 14 orang dan bergolongan II sejumlah 1 orang.

Tabel 4.1
Data kepegawaian Satker 139251 Tahun Anggaran 2022

No.	NAMA / NIP	GOLONGAN	JABATAN
1	Hardian, S.T., M.T. NIP. 19690114 199803 1 004	IV/b	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2	Endang Sugianto NIP. 19651127 198811 1 002	III/b	Bendahara Pengeluaran
3	Sumiyati NIP. 19671109 198908 2 002	II/b	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)
4	Budi Santoso, S.T. NIP. 19720717 200212 1 004	III/b	Staff Pengelola Satker
5	Eny Suryati, A.Md NIP. 19760202 201001 2 005	III/a	Staff Pengelola Satker
6	Emilia, S.T. NIP. 19720520 199803 2 007	III/d	PPK Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa kab. Sambas
7	Fitria Utami, S.T. NIP. 19830710 201001 2 006	III/d	PUMK/ Staff Pengelola Kab. Sambas
8	Faisal NIP. 19650815 199903 1 002	III/a	Staff Pengelola Kab. Sambas
9	Juli Erwansyah, S.T., M.P. NIP. 19750718 200212 1 006	III/d	PPK Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa kab. Kubu Raya dan Kab. Ketapang
10	Eko Saptono, A.Md NIP. 19660827 199703 1 004	III/b	PUMK/ Staff Pengelola Kab. Ketapang
11	Ngadino NIP. 19680414 199703 1 006	III/b	Staff Pengelola Kab. Ketapang

12	Verma Yunita Carolina, S.ST NIP. 19780203 200903 2 004	III/d	PUMK/ Staff Pengelola Kab. Kubu Raya
13	Sapari, S.T. NIP. 19650507 198810 1 002	III/d	Staff Pengelola Kab. Kubu Raya
14	Aditya Prasetyo, A.Md NIP. 19941107 201902 1 002	II/c	Koordinator Petugas pelaporan E-Monitoring
15	Fita Yulianty, S.T.	III/a	Petugas pelaporan E-Monitoring
16	Rajis, S.Kom	III/a	Petugas pelaporan E-Monitoring
17	V. Rian Waluvi, S.T. NIP. 19960510 201902 2 004	III/a	Penanggung Jawab UAKPA/Barang
18	Aris Purnomo, S.T. NIP. 19920806 201902 1 001	III/a	Koordinator UAKPA/Barang
19	Darius Leno, S.E.	III/a	Ketua/Wakil Ketua UAKPA/Barang
20	Nano Malapaz, S.Kom	III/a	Anggota/Petugas UAKPA/Barang
21	Dereck Kenneth U., S.Sos	III/a	Anggota/Petugas UAKPA/Barang

- 139034 / PELAKSANAAN PRESERVASI dan PENINGKATAN KAPASITAS JALAN NASIONAL

Didukung oleh 11 orang PNS dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Golongan IV berjumlah 2 orang, golongan III 5 orang dan golongan II berjumlah 4 orang.

Tabel 4.2
Data kepegawaian Satker 139034 Tahun Anggaran 2022

No.	NAMA / NIP	GOLONGAN	JABATAN
1	Iskandar Zulkarnaen, S.T., M.T. 19700510 199203 1 016	IV/b	Kepala Satuan Kerja
2	Supiandi, S.T., M.T. 19670712 199203 1 020	III/d	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Neni Miryani 19730202 200701 2 020	II/d	Pejabat Penguji Taguhan / Penandatangan SPM
4	Puji Mulyani, S.T., M.T. 19750604 200401 2 002	IV/a	Bendahara Pengeluaran
5	Asep Sopandi, S.ST 19700306 200701 1 002	III/b	Kepala Pengawas Lapangan
6	Refiadi, A,Md 1984120 201402 1 002	II/d	Asisten Umum / Penelaah Data Keuangan
7	Hendri Asagokma, S.T. 19830907 20100 1 012	III/c	Asisten Pengawas
8	Arno Ardhi Manto, A.Md 19810616 201101 1 004	III/a	Asisten Teknik & Perencanaan
9	Ari Jafari 19810511 200901 1 005	II/d	Ketua Tim Pelaksanaan E- Monitoring / Pelaporan

10	Endang Emi Sudarmi, S.ST 19641101 198703 2 013	III/d	Pengurus / Penyimpan BMN
11	Mulyadi 19740625 200911 0 001	II/c	Petugas Administrasi / TU

3) Realisasi Anggaran

Tabel 4.3
Program, Kegiatan dan Realisasi Tugas Pembantuan tahun 2022

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	REALISASI		
			Keuangan		Fisik
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
Bidang Sumber Daya Air					
1.	PROGRAM KETAHANAN SUMBER DAYA AIR	18.277.610.000	18.213.352.890	99,65%	100%
1	Kegiatan Operasi Rutin	536.242.000	515.522.950	96,14%	100%
2	Kegiatan Pemeliharaan Berkala	5.511.602.000	5.495.000.000	99,70%	100%
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin	12.229.766.000	12.202.829.940	99,78%	100%
2.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	1.251.011.000	968.678.667	77,43%	100%
1	Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	830.531.000	670.847.573	80,77%	100%
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	420.480.000	311.533.632	74,09%	100%
Bidang Bina Marga (kode satker 139034 / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar)					
3.	PELAKSANAAN PRESERVASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS JALAN NASIONAL	12.268.599.000	12.147.086.000	99,01%	99,06%
1	Layanan Penyiapan Dan Pengendalian Pelaksanaan	233.760.000	230.289.000	98,52%	98,52%
2	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	8.772.042.000	8.772.042.000	100%	100%
3	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	729.306.000	729.306.000	100%	100%
4	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (padat karya)	847.524.000	840.991.000	99,23%	100%
5	Preservasi Jembatan	577.767.000	577.767.000	100%	100%
6	Preservasi Rutin Jembatan (padat karya)	392.785.000	376.484.000	95,85%	72,52%
7	Layanan Dukungan Manajemen Satker	715.415.000	620.208.000	86,69%	86,85%
TOTAL ANGGARAN		31.797.220.000	29.340.083.928	86,35%	99,53%

Tabel 4.4
Perbandingan Realisasi tahun 2021 dengan tahun 2022

NO.	SATKER	PAGU		REALISASI			
		2021	2022	2021		2022	
1	2	3	4	5		6	
1.	139251 / OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SDA	18.883.123.000	19.528.621.000	18.825.487.000	99,30%	17.192.997.928	88,04%
2.	139034 / PELAKSANAAN PRESERVASI dan PENINGKATAN KAPASITAS JALAN NASIONAL	18.407.501.000	12.268.599.000	18.406.786.000	99,94%	12.147.086.000	99,01%
TOTAL ANGGARAN		37.290.624.000	31.797.220.000	37.232.273.000	99,84%	29.340.083.928	86,35%

Dibandingkan dengan tahun 2021 ada pengurangan anggaran pada tahun 2022 dengan nilai Rp5.493.404.000. Tidak hanya pengurangan anggaran, bahkan rata-rata realisasi mengalami penurunan 13,49% dari tahun 2022 (86,35%) berbanding tahun 2021 (99,84%). Penurunan kinerja ini perlu mendapat perhatian mengingat rata-rata realisasi keuangan kurang dari 90% pada tahun 2022.

4.2 Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

4.2.1 139251 / OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SDA

Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan baik, tidak ditemukan permasalahan / kendala yang signifikan sehingga perlu menjadi perhatian. Hanya ada beberapa kegiatan yang realisasi belum maksimal, apa yang diperlukan hanya pematangan perencanaan guna efektif dan efisiensi anggaran, minimal penyerapan anggaran 95%.

4.2.2 139034 / PELAKSANAAN PRESERVASI dan PENINGKATAN KAPASITAS
JALAN NASIONALTabel 4.5
Permasalahan dan solusi satker 139034 Tahun Anggaran 2022

No.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Kurangnya pengaturan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sehingga tidak terarah, dikarenakan jumlah personil Penyedia Jasa tidak mencukupi untuk kebutuhan lapangan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.	Mendorong Penyedia Jasa untuk meningkatkan kemampuan personil dan menyesuaikan personil lapangan dengan kebutuhan lapangan.
2	Penandatanganan Kontrak baru dilakukan pada bulan Januari 2022 mengakibatkan progres pekerjaan masih rendah atau tidak ada kegiatan di awal Bulan Januari.	Selalu melakukan koordinasi dengan penyedia jasa untuk meningkatkan progres pekerjaan dengan menambah peralatan, waktu jam kerja (lembur) serta melaksanakan pengecekan rutin AMP sesuai dengan standar pemeliharaan alat.
3	AMP Penyedia Jasa sering mengalami kerusakan sehingga Produksi Hotmix tidak sesuai dengan rencana kerja perhari.	Diharapkan penyedia Jasa dalam pelaksanaan di lapangan menyesuaikan pekerjaan yang dilaksanakan dengan jadwal rencana, untuk menghindari ketimpangan progres pekerjaan.

BAB V

PENUTUP

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada Tahun Anggaran 2022 telah dialokasikan dana untuk belanja APBD Provinsi Kalimantan Barat sebesar **Rp737.453.372.409,00** yang terdiri dari Belanja Operasi **Rp288.981.389.001,00** dan Belanja Modal **Rp448.471.983.408,00** dan dana APBN Tugas Pembantuan sebesar **Rp31.797.220.000,00**. Penyerapan anggaran APBD **Rp709.779.288.912,00** atau **96,25%** dan APBN (TP) **Rp29.340.083.928,00** atau **86,35%**. Didukung oleh 202 pegawai yang terdiri dari 114 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 88 orang tenaga kontrak.

Capaian kinerja infrastruktur dari hasil penyerapan anggaran dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air berupa 56,90% Irigasi kondisi baik, 53,02% pemeliharaan sungai sebagai pengendali banjir, 87,31 Km panjang pengendali banjir kondisi baik dan 12.142,51 Km panjang irigasi kondisi baik. Capaian Program Penataan Bangunan Gedung berupa 15.026,08 M² luas bangunan gedung yang dibangun dan ditata sejumlah 15 unit. Capaian Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya berupa 6.311,63 M² luas kawasan yang dibangun dan ditata sejumlah 7 kawasan. Capaian Program Penyelenggaraan Jalan berupa 72,28% kondisi jalan mantap, mengalami peningkatan 5,33% dengan 1.109,25 Km panjang jalan mantap. Capaian Program Pengembangan Jasa Konstruksi berupa 78,56% tenaga kerja ahli konstruksi bersertifikat sampai dengan tahun 2022. 80 orang peserta pelatihan 76 orang dinyatakan lulus dan bersertifikat.

Perjalanan dalam penyerapan anggaran tidak terlepas dari beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian. Terutama dalam capaian infrastruktur pada pelaksanaan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase. Mengingat masih berupa rencana kebijakan baik itu strategi maupun teknis sistem serta pengumpulan data dari perjalanan dinas yang dilakukan. Namun belum bisa mewujudkan fisik infrastruktur sebagai bagian dari bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi kewenangan dan di kelola oleh Pemerintah Provinsi. Tidak hanya itu, tantangan terhadap capaian jalan mantap 80% yang merupakan target dari akhir tahun

RPJMD (tahun 2023) juga perlu menjadi perhatian, bahkan sudah tersirat dalam rekomendasi DPRD.

Menanggapi akan tantangan di atas, sudah di ambil kebijakan yang telah ditetapkan dalam perencanaan penganggaran di tahun 2023. Pelaksanaan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase memiliki rencana anggaran dalam mewujudkan rencana induk sebagai pondasi guna pembangunan infrastruktur Standar Pelayanan Minimal (SPM). Juga alokasi anggaran dalam pencapaian jalan mantap 80% pada Program Penyelenggaraan Jalan mengalami peningkatan di tahun 2023.

Mempertimbangkan semua aspek capaian dan tantangan ke depan yang harus dihadapi. Diharapkan laporan ini dapat menjadi pertimbangan dan patokan akan arah kebijakan menuju pemerintahan yang lebih baik. Baik itu untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maupun Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.